

Judul : Petani kekurangan, pupuk subsidi jangan sampai mempersulit petani
Tanggal : Minggu, 21 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Petani Kekurangan

Pupuk Subsidi Jangan Sampai Persulit Petani



Rajiv

ANGGOTA Komisi IV DPR Rajiv mendorong agar distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tidak mempersulit petani. Saat ini banyak petani yang memenuhi syarat tidak mendapatkan pupuk bersubsidi lantaran distributor atau kios berdalih stok kosong.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait pemenuhan kebutuhan pupuk di tingkat petani. Padahal di saat yang sama, penyerapan pupuk bersubsidi di beberapa daerah terhitung rendah. Sehingga menimbulkan kecurigaan, ada pihak yang bermain dalam distribusi.

"Contohnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, penyerapan hanya sekitar 40-50 persen. Bisa jadi ada pihak-pihak yang bermain dalam distribusi, atau petani yang belum memahami mekanisme penyesuaian," terang anggota Fraksi NasDem itu di Jakarta, kemarin.

Komisi IV DPR, sambungnya, akan bertindak tegas jika ditemukan penggelapan pupuk bersubsidi. Izin distributor yang terbukti memainkan para petani dipastikan akan dicabut, tanpa memandang siapa pihak yang terlibat atau latar belakang perizinannya.

Dia ingin memastikan alur distribusi pupuk bersubsidi dari produsen sampai ke petani berlangsung transparan. Tujuannya, agar tidak ada lagi keluhan dari petani terkait keterlambatan atau kekurangan pupuk. "Segala bentuk per-

mainan yang merugikan petani akan ditindak secara hukum," tegasnya.

Legislator asal Dapil Jawa Barat II itu mengingatkan agar distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, waktu, dan jumlah, sesuai peraturan yang berlaku. Ini penting untuk menjamin kesejahteraan petani dan keberhasilan panen. Dengan mekanisme yang jelas, alur distribusi akan berjalan lancar di seluruh wilayah.

Selanjutnya, dia juga menyoroti sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDCK) yang masih belum sepenuhnya dipahami petani. Banyak petani mengira cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pupuk di kios, padahal tetap harus terdaftar dalam e-RDCK terlebih dahulu. "Kesalahpahaman ini menyebabkan kebingungan di lapangan dan menghambat akses pupuk bersubsidi," ucapnya.

Transparansi dalam alur distribusi menjadi solusi untuk mengurangi sengketa dan miskomunikasi. Dengan mekanisme yang jelas, petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan dan waktu yang tepat. Ketersediaan pupuk yang memadai diyakini akan berdampak positif pada produktivitas pertanian. "Pemerintah dan Komisi IV DPR mendorong sosialisasi sistem e-RDCK agar petani lebih memahami cara menebus pupuk subsidi," katanya.

Senada, anggota Komisi IV Daniel Johan mendorong perbaikan tata niaga pupuk subsidi. Perbaikan sistem distribusi sangat krusial agar penyaluran pupuk tepat sasaran dan tidak merugikan petani. Tata niaga pupuk harus bebas dari praktik korupsi.

Dia bilang, korupsi dalam penyaluran pupuk sangat merugikan petani. Pasalnya, pupuk merupakan kebutuhan pokok yang menentukan keberhasilan panen. Pupuk sebagai kebutuhan utama petani lebih penting dibanding perbaikan jalan atau irigasi. ■ PVB